

EFEKTIFITAS PENERAPAN INSTRUMEN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT

WARDI^{1)*}, UMAR²⁾, HUSNI³⁾

Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Inovasi,
Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

wardiskm186@gmail.co.id (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pemanfaatan Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Soisial Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuan penelitian ini terdiri atas; 1) Untuk mengetahui upaya pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sumbawa Barat. 2) Untuk menganalisis Efektifitas Pemanfaatan Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian didapatkan bahwa pemanfaatan Instrumen Akreditasi LKSA sudah efektif sebagai acuan dalam memberikan pelayanan dan berdampak positif bagi perkembangan LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan menggunakan Instrumen Akreditasi LKSA, lembaga mampu mengukur kualitas pelayanannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak. Pengukuran efektifitas pemanfaatan instrumen akreditasi LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan Rasch Model menunjukkan bahwa seluruh peserta berpendapat akreditasi LKSA yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang substansi dan makna dari berbagai landasan hukum/peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan akreditasi, memberikan tambahan kemampuan/keterampilan dalam penyusunan akreditasi. Pelaksanaan program LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dengan Pemanfaatan Instrumen Akreditasi sudah efektif sebagai acuan dalam memberikan pelayanan dan berdampak positif bagi perkembangan LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan menggunakan Instrumen Akreditasi LKSA, lembaga mampu mengukur kualitas pelayanannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak..

Kata kunci: Efektivitas, Intrumen Akreditasi, LKSA

ABSTARCT

This research discusses the effectiveness of the use of the Accreditation Instrument for Child Social Welfare Institutions (LKSA) in the West Sumbawa Regency Social Service. The objectives of this research consist of; 1) To find out the service efforts of the Child Social Welfare Institution (LKSA) in West Sumbawa Regency. 2) To analyze the effectiveness of the use of the Accreditation Instrument for Child Social Welfare Institutions (LKSA) at the West Sumbawa Regency Social Service. The research results showed that the use of the LKSA Accreditation Instrument has been effective as a reference in providing services and has had a positive impact on the development of LKSA in West Sumbawa Regency. By using the LKSA Accreditation Instrument, institutions are able to measure the quality of their services in order to improve children's welfare. Measuring the effectiveness of the use of the LKSA accreditation instrument in the West Sumbawa Regency Social Service using the Rasch Model shows that all participants are of the opinion that LKSA accreditation carried out by the West Sumbawa Regency Social Service provides additional knowledge and understanding of the substance and meaning of various legal/regulatory bases which serve as a reference in implementation. accreditation, providing additional abilities/skills in preparing accreditation. The implementation of the LKSA program at the West Sumbawa Regency Social Service using the Accreditation Instrument has been effective as a reference in providing services and has had a positive impact on the development of LKSA in West Sumbawa Regency. By using the LKSA Accreditation Instrument, institutions are able to measure the quality of their services in order to improve children's welfare.

Keywords: Effectiveness, Accreditation Instrument, LKS

PENDAHULUAN

Untuk membesarkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Perjalanan hidup seorang anak tidak selalu mudah. Beberapa anak dihadapkan pada pilihan yang sulit bahwa individu harus berpisah dari keluarga karena suatu alasan, berstatus yatim, piatu atau yatim piatu bahkan mungkin menjadi anak terlantar (Arif, 2018).

Lingkungan masyarakat merupakan faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi perkembangan anak remaja yang sulit dikontrol pengaruhnya. Orang tua dan sekolah adalah lembaga yang khusus, mempunyai anggota tertentu, serta mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang pasti dalam mendidik anak. Berbeda dengan masyarakat, yang mempunyai aktivitas yang beragam. Berlaku untuk segala tingkatan umur dan ruang lingkup yang sangat luas (Maciej Serda *et al.*, 2021).

Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Pendidikan putus di tengah jalan disebabkan karena berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan, salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang memprihatinkan. Disadari bahwa kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginannya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan. Kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya. Secara garis besar, kesejahteraan anak terhadap pendidikan diawali dengan ketergantungannya kepada usaha orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya (Ziana *et al.*, 2019).

Upaya-upaya penanganan terhadap anak tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk pelayanan sosial, yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan tujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan baik perorangan, kelompok maupun masyarakat sehingga tercapai kehidupan sejahtera. Kesejahteraan anak dalam hal ini dapat diukur dengan melihat sejauh mana pelayanan sosial yang diberikan kepada anak yang mengalami kesulitan tersebut (Sutinah, 2018).

Panti Asuhan Anak sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terikat oleh beberapa peraturan yang terkait dengan standar pengelolaan LKSA. Seperti Permensos Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; Permensos Nomor: 17/2012 Tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; dan Permensos Nomor: 22/ 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu para pengelola panti asuhan harus memahami ketiga regulasi tersebut, agar pengelolaan panti asuhan bisa memenuhi standar yang ditetapkan (<https://dinsos.jatengprov.go.id>).

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu anak-anak yang mempunyai masalah melalui lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan UU No. 23 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 10 adalah “anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar” (Gede *et al.*, 2013).

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Asuhan, yaitu Suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan. Panti adalah rumah tempat (kediaman) sedangkan asuhan merupakan tempat kegiatan memelihara anak yatim/yatim piatu dan sebagainya. Secara singkat Panti Asuhan adalah rumah pemberdayaan anak yatim/yatim piatu (Khoirunnisa *et al.*, 2015).

Penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar melalui sistem panti adalah dimana asuhan diberikan kepada anak-anak yang sangat terlantar atau karena tingkah lakunya yang tidak bisa diterima oleh keluarga asuhnya. Asuhan dalam panti adalah bagaimana mengganti orangtua bagi anak yang terlantar sehingga anak merasa terjamin hidup dalam kelompok anak-anak, dimana pelayanan yang diberikan berupa penyediaan fasilitas-fasilitas, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, bimbingan rohani serta keterampilan dimana diharapkan anak-anak tersebut dapat mengembangkan pribadi, potensi, kemampuan dan minatnya secara optimal (Novami & Mansur, 2018).

Secara umum bahwa panti asuhan di kota-kota besar mencoba berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi pada anak dimana panti asuhan tersebut menampung anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan. Penanganan masalah sosial anak terlantar di Kabupaten Sumbawa Barat melalui sistem Panti adalah dimana asuhan diberikan kepada anak-anak yang sangat terlantar atau karena tingkah lakunya yang

tidak bisa diterima oleh keluarga asuhnya. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, jumlah LKS/LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 sebanyak 27 Buah.

Dari 27 LKS/LKSA yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, jumlah LKS/LKSA yang sudah melaksanakan akreditasi masih minim yaitu diangka 10 lembaga. Dari lembaga yang sudah melaksanakan akreditasi tersebut, hanya beberapa LKSA saja yang antusias melaksanakan akreditasi. Hal ini disebabkan karena masih banyak LKSA yang belum mencapai kualitas standar minimal pemerintah. Ada sembilan aspek standar yang harus dipenuhi LKSA, antara lain program, manajemen organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hasil pelayanan. Untuk itu, LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat, harus tetap meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak-anak yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Untuk memantau kualitas pelayanan di masing-masing LKSA, maka Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat mengetahui perkembangan masing-masing LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan upaya untuk mengkaji sejauh mana efektifitas penerapan instrumen akreditasi LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat sehingga lembaga tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal kesejahteraan anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimanakah efektifitas penerapan instrumen akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk menganalisis efektifitas pemanfaatan Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yakni bulan Juli – Agustus 2023.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta terkait efektivitas penerapan instrumen akreditasi LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Desain penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan fenomena dalam konteks alamiahnya. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan makna, pandangan, dan pengalaman subjek yang terlibat, serta melihat variasi dan perbedaan dalam konteks yang relevan (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian menerapkan metode survei secara online (Alderete, 2021; Wibowo et al., 2020) melalui angket Skala Likert (sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju) untuk mendapatkan jawaban responden.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek dan subjek yang mempunyai suatu kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi adalah himpunan dari keseluruhan objek yang diteliti. Adapun populasi pada penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari pegawai di Dinas Sosial, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta masyarakat.

Menurut (Sugiyono, 2015) bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi". Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, dimana jumlah responden sebanyak 100 orang yang merupakan jumlah total populasi penelitian. Adapun teknik sampling (cara mengambil sampel) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mengambil anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2015). Jumlah sampel sebanyak 100 orang yang terdiri dari 50 orang karyawan dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yaitu sebanyak 50 orang responden.

Sedangkan untuk LKSA dan masyarakat/keluarga dari anak-anak yang berada di LKSA adalah sebanyak 50 orang responden, sehingga jumlah responden yang diwawancarai secara random adalah masing-masing 10% dari dinas sosial dan 10% dari LKSA.

Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses penafsiran data yang bersifat deskriptif dan tidak melibatkan perhitungan matematis. Dalam analisis data kualitatif, fokus utama pada memahami makna, konteks, dan interpretasi dari data yang diperoleh. Sedangkan analisis data kuantitatif adalah proses untuk menganalisis data berupa angka atau variabel yang dapat diukur. Dalam analisis data kuantitatif, metode statistik digunakan untuk mengolah dan menganalisis data (Sugiyono, 2015). Analisis data kuantitatif berupa analisis pada hasil angket kuisioner responden terkait pengukuran efektivitas pemanfaatan instrumen akreditasi LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat. Analisis ini dilakukan dengan: 1) Menghitung banyaknya responden yang menjawab Efektif dan Sangat Efektif; 2) Menghitung persentase Efektivitas pada seluruh item. Sedangkan analisis data kualitatif berupa analisis hasil angket wawancara yang dilakukan pada perwakilan pihak yang terkait dengan akreditasi LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut (Sugiyono, 2015) mengungkapkan proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Tahap deskripsi, tahap reduksi, tahap seleksi, dan pengecekan keabsahan temuan. Sebelum objek penelitian diberikan perlakuan terlebih dahulu dilakukan analisis data awal. Analisis data awal digunakan untuk mengetahui apakah objek penelitian berasal dari kondisi awal yang sama. Sebelum itu diperlukan suatu desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana tentang cara menggunakan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu. Langkah-langkah dalam tahap awal adalah sebagai berikut: Uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis.

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara tingkat pencapaian hasil belajar pada kelompok eksperimen yang diberikan treatment atau perlakuan berupa pemberian media benda kongkret dan yang tidak diberikan treatment atau perlakuan. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis uji-t, semua data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2015). Selanjutnya nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ atau 5% jika $thitung \geq ttabel$ maka hipotesis diterima. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software Winsteps.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Upaya Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Kabupaten Sumbawa Barat

1. Hasil Wawancara Upaya Pelayanan LKSA dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gambaran LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat sudah memberikan pelayanan dan pengasuhan dan sebagian sudah terakreditasi. Jenis pelayanan yang diberikan adalah perlindungan dan jaminan untuk anak yatim, anak yatim piatu, anak terlantar, serta anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Penelitian ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Suhardi dalam penelitiannya dalam judul Upaya Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Wahyu Ilahi dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang menyebutkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. Sungkono (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo dalam membentuk Life Skill anak asuh melalui Pelatihan Kewirausahaan, yang menyebutkan bahwa Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) menurut Depsos RI, yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan. Dalam memberikan pelayanan LKSA berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait.

Program dan layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak dasar anak, diantaranya pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, agama, dan kesejahteraan sosial lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya LKSA melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar. Keberhasilan capaian program-program pelayanan LKSA dapat dilihat dari terpenuhinya hak-hak dasar seperti terpenuhinya hak pengasuhan, pendidikan, sehingga anak dipersiapkan untuk dapat mandiri di tengah masyarakat, sesuai dengan visi LKSA untuk

menghasilkan anak-anak yang cerdas, sholih-sholihah, dan mandiri sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Pelaksanaan akreditasi LKSA sudah dilaksanakan secara rutin dan berkala, dengan harapan proses akreditasi LKSA akan berdampak positif bagi LKSA dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Juli Astutik, dkk dalam penelitiannya yang berjudul *Pendampingan Panti Asuhan Menuju Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang Terakreditasi*, menyebutkan bahwa manfaat ketika LKSA telah mendapat akreditasi antara lain; 1) Lembaga memiliki legalitas dan kelayakan pengasuhan sesuai standar nasional pengasuhan anak, 2) LKSA yang terakreditasi mendapat pembinaan dan akses penguatan dari lembaga pemerintah (Kementrian Sosial, Dinas Sosial), dan bahkan lembaga-lembaga sosial lainnya. Nurhayati Narubekti, dkk dalam *Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bengkulu*, menyebutkan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk apresiasi dan legitimasi pemerintah terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) karena telah berperan dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Akreditasi bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Hasil Wawancara Upaya Pelayanan LKSA dengan Ketua LKSA Al-Balad Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LKSA Al-Balad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gambaran LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat sudah memberikan pelayanan, namun secara khusus masih kurangnya SDM pengelola yang terlatih. Penelitian ini hampir sama yang dilakukan oleh Juli Astuti, dkk (2021) menyebutkan bahwa Muhammadiyah dan Aisyiyah Jawa Timur saat ini mendapatkan amanah kepercayaan untuk mengelola keberlangsungan 120 Panti Asuhan, sebagian dari LKSA tersebut sejak tahun 2015 telah mengupayakan peningkatan kualitas kelembagaan dan layanannya dengan lolos akreditasi LKSA oleh BALKS. Akan tetapi, di beberapa LKSA yang secara geografis akses dukungan kurang, sumber daya manusia yang terbatas, menyebabkan panti asuhan milik Muhammadiyah belum baik pengelolaan kelembagaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarti (2018), dalam penelitiannya yang berjudul *Analisa Keberadaan LKSA di Kabupaten Sidoarjo* mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi pengurus LKSA dalam memenuhi standarisasi SNPA, selain berkaitan dengan keterbatasan dana dan SDM, juga karena jumlah anak asuh yang dilayani tidak sebanding dengan kemampuan pendanaan dan SDM yang dimiliki.

Harapannya kepada Dinas Sosial untuk dapat diberikan pembinaan secara rutin. Jika tidak tersedia pekerja sosial profesional, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan tenaga kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan pelatihan tentang sistem pengasuhan anak dan mendapatkan supervisi yang regular dari pekerja sosial profesional atau dari lembaga sosial yang ditunjuk atau dari Dinas Sosial (Standar Nasional Untuk Pengasuhan LKSA, 2011).

Jenis pelayanan yang diberikan adalah pendidikan formal, belajar Al-Qur'an, dan pelayanan kesehatan secara berkala. Dalam memberikan pelayanan LKSA berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Program dan layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak dasar anak, diantaranya pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan belajar Al-qur'an. Dalam melaksanakan fungsinya LKSA melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar. Keberhasilan capaian program-program pelayanan dapat dilihat dari perubahan anak-anak sebelum dengan setelah mereka berada dalam LKSA, sesuai dengan visi LKSA Al-Balad untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas, sholih-sholihah, dan melahirkan seorang pemimpin.

Pelaksanaan akreditasi LKSA Al-Balad sudah dilaksanakan secara rutin dan berkala, dengan proses akreditasi LKSA akan berdampak besar dan positif bagi perkembangan LKSA. Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melakukan assesment terlebih dahulu terhadap usulan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Juli Astutik, dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Pendampingan Panti Asuhan Menuju Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang Terakreditasi*, menyebutkan bahwa manfaat ketika LKSA telah mendapat akreditasi antara lain; 1) Lembaga memiliki legalitas dan kelayakan pengasuhan sesuai standar nasional pengasuhan anak, 2) LKSA yang terakreditasi mendapat pembinaan dan akses penguatan dari lembaga pemerintah (Kementrian Sosial, Dinas Sosial), dan bahkan lembaga-lembaga sosial lainnya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Narubekti, dkk (2020) dalam *Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bengkulu*, menyebutkan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk apresiasi dan legitimasi pemerintah terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) karena telah berperan dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Akreditasi bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Hasil Wawancara Upaya Pelayanan LKSA dengan Ketua LKSA Baitussakinah Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LKSA Baitussakinah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gambaran umum LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat sudah layak dan keberadaanya membantu daerah,

akan tetapi jumlahnya masih sedikit. Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai (Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA) Permensos, 2011). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Sukadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NKRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang 1Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar.

Jenis pelayanan yang diberikan adalah pendidikan formal dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Dalam memberikan pelayanan LKSA berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan non pemerintah dan programnya selalu disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah dan pihak swasta lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya LKSA melibatkan orang tua, keluarga dan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilannya, LKSA melakukan evaluasi internal setiap bulan, sehingga anak-anak yang tinggal di LKSA Baitusakinah dapat bersekolah, mendapatkan pengasuhan, bahkan sebagian mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan, LKSA Baitusakinah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Akreditasi dilaksanakan secara rutin sesuai aturan, dan dapat berdampak positif bagi perkembangan LKSA. Penelitian ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Juli Astutik, dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pendampingan Panti Asuhan Menuju Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang Terakreditasi, menyebutkan bahwa manfaat ketika LKSA telah mendapat akreditasi antara lain; 1) Lembaga memiliki legalitas dan kelayakan pengasuhan sesuai standar nasional pengasuhan anak, 2) LKSA yang terakreditasi mendapat pembinaan dan akses penguatan dari lembaga pemerintah (Kementrian Sosial, Dinas Sosial), dan bahkan lembaga-lembaga sosial lainnya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Narubekti, dkk (2020) dalam Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk apresiasi dan legitimasi pemerintah terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) karena telah berperan dan berkontribusi besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Akreditasi bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Efektifitas Penerapan Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang efektivitas penerapan instrumen akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat melalui angket survey dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Juli dan minggu pertama bulan Agustus 2023, didapatkan data sebagai berikut:

Pengukuran efektivitas pemanfaatan instrumen akreditasi LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan Rasch Model menunjukkan bahwa seluruh peserta berpendapat bahwa akreditasi LKSA yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat telah dilaksanakan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang substansi dan makna dari berbagai landasan hukum/peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan akreditasi, memberikan tambahan kemampuan/ketrampilan dalam penyusunan akreditasi, dan mendesiminasikan hasil penelitian tentang efektivitas pemanfaatan instrumen akreditasi LKSA di Dinas Sosial tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian Ajeng Diah Rahmadina, S.Sos (2019) yang berjudul Implementasi Akreditasi LKSA Artanita Al-Khoeriyah Kota Tasikmalaya, menyebutkan bahwa dampak perubahan ke arah positif setelah dilakukan akreditasi meliputi 3 hal yaitu peningkatan tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi terhadap perlindungan anak, adanya peningkatan dan perbaikan manajemen pelayanan dalam assesment, dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pemenuhan hak-hak anak.

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Uji validitas instrument tes berupa soal objektif menggunakan program SPSS 22.0 dan Rasch Model dengan bantuan software Winstep.

Nilai outfit MNSQ yang diterima : $0,5 < \text{MNSQ} < 1,5$

Nilai outfit ZSTD yang diterima : $-2,0 < \text{ZSTD} < +2,0$

Nilai Pt Measure Corr yang diterima : $0,4 < \text{Pt Measure Corr} < 0,85$

Setelah dilakukan uji validitas pada butir soal diperoleh hasil seperti yang tertuang pada Tabel 1

Tabel 1. Tentang Uji Validitas

No	MNSQ	ZSTD	P.Mcorr	Keterangan
1.	1.13	0.55	0.90	VALID
2.	0.53	-1.49	0.91	VALID
3.	0.84	-0.43	0.90	VALID
4.	0.41	-1.93	0.92	TIDAK VALID
5.	1.30	1.12	0.89	VALID
6.	0.79	-0.45	0.87	VALID
7.	0.94	0.01	0.86	VALID
8.	0.97	0.08	0.84	VALID
9.	0.92	-0.11	0.87	VALID
10.	0.84	-0.45	0.90	VALID
11.	0.73	-0.93	0.91	VALID
12.	1.10	0.40	0.88	VALID
13.	1.17	0.56	0.85	VALID
14.	0.57	-1.81	0.93	VALID
15.	0.47	-1.95	0.93	TIDAK VALID
16.	1.05	0.26	0.87	VALID
17.	1.58	1.56	0.83	VALID
18.	1.48	1.59	0.85	VALID
19.	0.69	-0.95	0.90	VALID
20.	0.91	-0.08	0.86	VALID

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh perbandingan bahwa hasil uji validitas menggunakan Rasch model dengan bantuan software Winstep diperoleh 18 item yang valid dan 2 item tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Semakin tinggi koefisien korelasi antara hasil ukur dua tes yang paralel, maka konsistensi antara keduanya semakin naik dan alat ukur disebut alat ukur yang reliabel. Walaupun terdapat beberapa metode uji reliabilitas, namun pada artikel ini menggunakan uji reliabilitas instrument tes dengan Rasch model dengan bantuan software Winstep. Dari hasil kedua metode tersebut maka diperoleh hasil reliabilitas seperti yang dituangkan pada tabel 2.

Uji reliabilitas menggunakan Rasch model dengan bantuan software Winstep diperoleh 0,97 yang artinya soal reliabel dengan kategori tinggi.

Tabel 2. Tentang Uji reliabilitas

SUMMARY OF 34 MEASURED (NON-EXTREME) Person

	TOTAL SCORE	COUNT	MEASURE	MODEL S.E.	INFIT MNSQ	ZSTD	OUTFIT MNSQ	ZSTD
MEAN	82.1	20.0	4.36	.54	.95	-.18	.92	-.22
SEM	2.9	.0	.59	.03	.08	.25	.09	.25
P.SD	16.7	.0	3.41	.15	.47	1.42	.51	1.45
S.SD	17.0	.0	3.46	.15	.48	1.45	.51	1.47
MAX.	99.0	20.0	8.88	1.03	2.60	2.69	2.64	2.73
MIN.	33.0	20.0	-4.74	.41	.05	-3.97	.05	-3.98
REAL RMSE	.58	TRUE SD	3.36	SEPARATION	5.77	Person RELIABILITY	.97	
MODEL RMSE	.56	TRUE SD	3.37	SEPARATION	6.06	Person RELIABILITY	.97	
S.E. OF Person MEAN	= .59							

3. Uji Hipotesis

Tabel 3 Tentang Uji Hipotesis

PERSON CODE	MEAN DIFFERENCE MEASURE	S.E.	t	Welch-2sided d.f.	Prob.
L P	-.72	1.14	-.63	45	.533

Berdasarkan output di atas di ketahui jika nilai Prob = 0,05 dengan asumsi akan diperoleh besarnya sampel secara maksimum adalah $0,533 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima.

Pembahasan

Hasil Wawancara Upaya Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden, dapat disimpulkan bahwa gambaran LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat sudah memberikan pelayanan dan pengasuhan, kondisinya sudah layak, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh daerah, namun masih kurangnya SDM pengelola yang terlatih. Jenis pelayanan yang diberikan adalah perlindungan dan jaminan untuk anak yatim, anak yatim piatu, anak terlantar, serta anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Selain itu difasilitasi dengan pendidikan formal mulai dari TK, SD, SMA termasuk juga pelayanan kesehatan dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

Dalam pelaksanaan program-programnya LKSA melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah dan non pemerintah, misalnya dengan Dinas Sosial berupa perlindungan dan jaminan serta rehabilitasi sosial untuk anak disabilitas, Dinas Dukcapil tentang status kependudukan, Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan tumbuh kembang anak, Dinas P2KBP3A untuk pemberdayaan dan perlindungan anak, Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang permasalahan pendidikan anak, dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumbawa Barat tentang dukungan sarana prasarana melalui dana hibah.

LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat dalam setiap program atau layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak anak berupa program layanan kebutuhan hak-hak dasar anak melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, agama, kesejahteraan sosial lainnya, bahkan therapy bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat LKSA tetap melibatkan keluarga dan komunitas dengan membangun komunikasi dengan para orang tua/wali terkait dengan proses tumbuh kembang anak, serta melibatkan masyarakat sekitar untuk berkontribusi dalam pengembangan LKSA.

Dalam mengukur keberhasilan dan dampak dari program-program yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak adalah dapat dilihat dari adanya perubahan pada anak-anak yang diasuh, yaitu pengasuhan bagi anak-anak yatim, piatu, yautim piatu, pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah, pelayanan kesehatan secara berkala, meningkatnya kemandirian sehingga mereka bisa mandiri dan berkarya.

Contoh konkret bagaimana LKSA Kabupaten Sumbawa Barat berhasil mengubah kehidupan anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan, yaitu terlihat dengan adanya perubahan pada anak-anak yang berada dalam pengasuhan LKSA, setelah mereka mendapatkan pelayanan melalui program yang ada maka terpenuhinya hak-hak dasar anak mulai dari hak pengasuhan, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi anak dalam berbagai kegiatan.

Rencana dan visi ke depan LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan yang diberikan kepada anak-anak di wilayahnya adalah menghasilkan anak-anak yang cerdas, sholih-sholihah, mandiri dan selanjutnya akan menjadi seorang pemimpin.

Sebagain dari LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat secara rutin telah melaksanakan akreditasi lembaga sesuai aturan. Akreditasi yang dilaksnakan berdampak besar dan positif bagi perkembangan LKSA, hal ini standar acuan dan standar bagi LKSA dalam mengukur pengembangan dan kemajuan LKSA. Akreditasi sangat berdampak besar dan positif bagi perkembangan LKSA, hal ini sebagai standar bagi LKSA dalam mengukur perkembangan dan kemajuan LKSA, selanjutnya dapat dimonitoring dan evaluasi oleh Dinas Sosial, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga LKSA.

Efektivitas Penerapan Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang efektivitas penerapan instrumen akreditasi Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat melalui angket survey dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Juli dan minggu pertama bulan Agustus 2023, didapatkan data sebagai berikut:

Pengukuran efektivitas pemanfaatan instrumen akreditasi LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan Rasch Model menunjukkan bahwa seluruh peserta berpendapat bahwa akreditasi LKSA yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat telah dilaksanakan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang substansi dan makna dari berbagai landasan hukum/peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan akreditasi, memberikan tambahan kemampuan/ketrampilan dalam penyusunan akreditasi, dan mendesiminasikan hasil penelitian tentang efektivitas pemanfaatan instrumen akreditasi LKSA di Dinas Sosial tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai Efektifitas Penerapan Instrumen Akreditasi LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak adalah segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh ketua dan pengurus LKSA dalam memberdayakan kesejahteraan sosial anak-anak yatim/yatim piatu maupun anak terlantar. Dalam upaya kesejahteraan sosial anak tersebut, LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat memiliki suatu program pelayanan, strategi pelayanan, tahap-tahap pembinaan, serta sarana dan prasarana yang cukup untuk menjadi penyelesaian masalah anak-anak terlantar dan yatim/yatim piatu, khususnya bagi anak-anak yang dibinanya. Upaya program layanan yang dilakukan diantaranya perlindungan dan jaminan untuk anak yatim piatu, anak terlantar, pendidikan formal dan non formal, pelayanan kesehatan serta kegiatan ekstra kurikuler.
2. Pelaksanaan program LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan standar Instrumen Akreditasi sudah efektif sebagai acuan dalam memeberikan pelayanan dan berdampak positif bagi perkembangan LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan menggunakan Instrumen Akreditasi LKSA, lembaga mampu mengukur dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti juga menguraikan beberapa saran yang mungkin akan berguna baik bagi penyelenggaraan pelayanan sosial di LKSA Dinas Sosial Kabupaten. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat diharapkan semua pihak untuk dapat berkontribusi. Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat memberikan dukungan pendanaan dan pembinaan secara berkala. Kepada Lembaga diharapkan untuk dapat mengelola program dan pelayanan LKSA dengan baik, serta peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan LKSA di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat di dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap LKSA yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dapat menggunakan Instrumen Akreditasi LKSA sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderete, M. V. (2021). Determinants of smart city commitment among citizens from a middle city in argentina. *Smart Cities*, 4(3), 1113–1129. <https://doi.org/10.3390/smartcities4030059>
- Ajeng Diah Rahmadina, S. S. NIM. 1520010080. (2019). *Implementasi Akreditasi Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Artanita Al-Khoiriyah Kota Tasikmalaya*.
- Arif, K. M. (2018). Pendidikan dan Pembinaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 87–97. <https://doi.org/10.34005/TAHDZIB.V1I2.455>
- Gede, O. ; Wedantara, Y., & Astiti, T. I. P. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Perdagangan Anak di Wilayah Hukum POLDA BALI. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/7159>
- Imam Sukadi. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak. <https://media.neliti.com>
- Juli Astutik, dkk. (2021). Pendampingan Panti Asuhan Menuju LKSA Yang Terakreditasi. <https://jurnla.umbuton.ac.id>

- Khoirunnisa, S., Ishartono, I., & Resnawaty, R. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I1.13258>
- Maciej Serda, Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. v.(2021). فاطمی ح. Edukasi Kesehatan Mengenai Praktik Cuci Tangan pada Guru sebagai Upaya Pencegahan Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 894–902. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Novami, C., & Mansur, T. M. (2018). Tanggung Jawab Hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(2), 342–347. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13259>
- Nurhayati Darubekti, Desy Afrita, Tamrin Bangsu (2020), Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Bengkulu. <https://repository.ummetro.ac.id/snppm2/halaman/33>
- Permensos Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan LKSA
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/AU.V2I1.18>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta
- Sunarti. (2018). Analisa Keberadaan LKSA di Kabupaten Sidoarjo. <https://e-journal.unair.ac.id>
- Sutinah, S. (2018a). Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(1), 66–78. <https://doi.org/10.20473/JSD.V13I1.2018.66-78>
- Wibowo, T. S., Endroyono, & Pratomo, I. (2020). Analysis of Malang City Readiness in Realizing Smart Tourism with New Integrated E-Readiness Model. *Proceeding - ICoSTA 2020: 2020 International Conference on Smart Technology and Applications: Empowering Industrial IoT by Implementing Green Technology for Sustainable Development*<https://doi.org/10.1109/ICoSTA48221.2020.1570616406>
- Ziana, U., & Khosmas Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan Pontianak, F. Y. (2019). Analisis Faktor Ekonomi Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Desa Teluk Kembang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 8(11). <https://doi.org/10.26418/JPPK.V8I11.37074>